



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NATUNA



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses

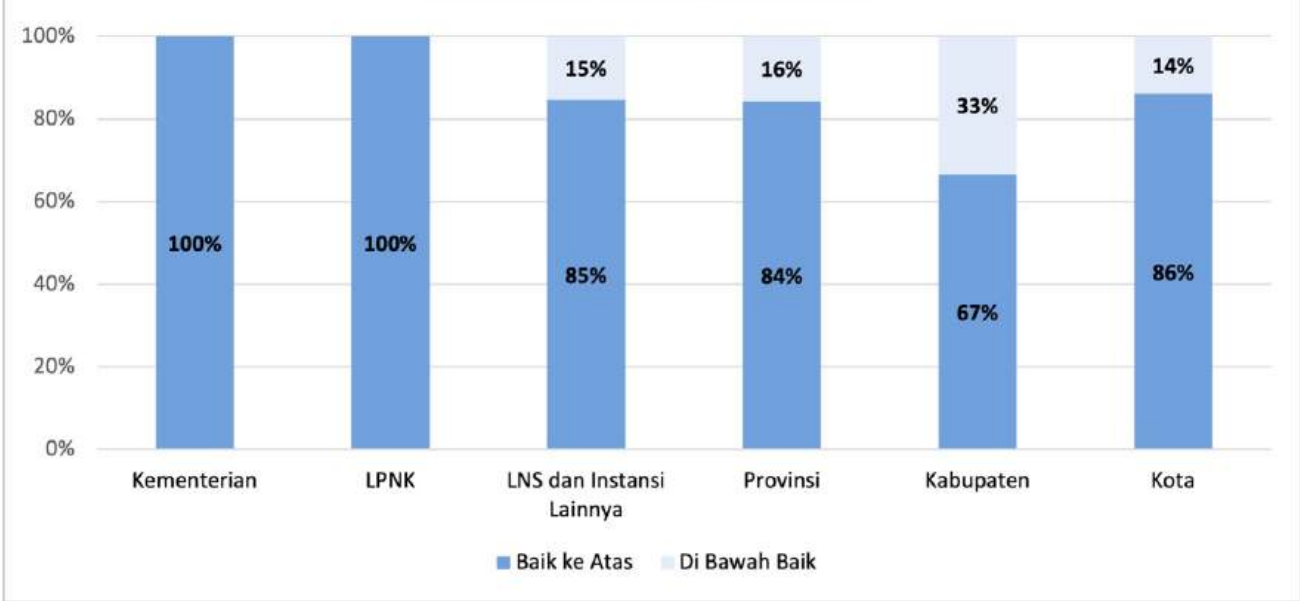


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

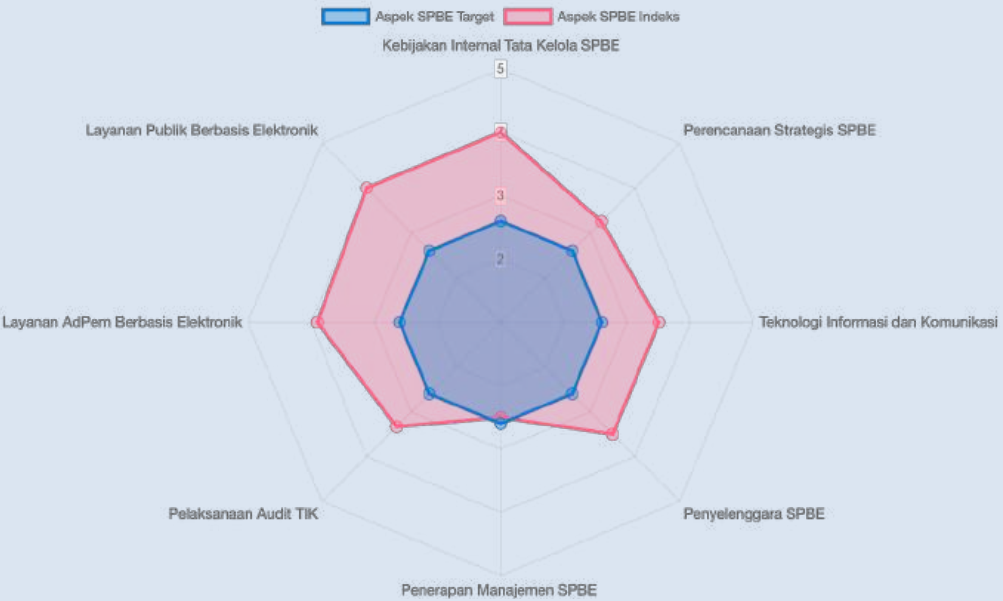
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																					
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																					
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																					
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																					
4	1,8 – < 2,6	Cukup																					
5	< 1,8	Kurang																					
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																					
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																					

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,61
Domain Kebijakan SPBE	4,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,50
<i>Audit TIK</i>	3,33
Domain Layanan SPBE	3,94
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,90
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola Semua indikator menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Natuna telah memenuhi dengan dibuktikan dengan berdasarkan bukti perbup 60/2022 didukung SK Bupati 158/2023 terkait peta rencana SPBE dan undangan rapat dan reuiu terhadap Perbup
- Kelemahan
Kelemahan Aspek Kebijakan Internal pada Pemerintah Kabupaten Natuna masih tidak ditemukan

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kekuatan
Kekuatan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah Kabupaten Natuna masih blum ditemukan
- Kelemahan
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Natuna pada Inovasi Proses Bisnis masih belum terdapat bukti dukung dokumen yang mengarah perbaikan proses bisnis yang disampaikan

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

"Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah"

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Pusat Data menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Natuna telah memenuhi ditunjukkan adanya dokumentasi SOP dan terdapat Reuiu terhadap kegiatan pelaksanaan layanan
- Kelemahan
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Natuna pada Pembangunan Aplikasi masih belum ada bukti dukung dokumen penerapan siklus pembangunan aplikasi yang disampaikan

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Natuna telah memenuhi dengan dibuktikan adanya rapat koordinasi, notulensi dan reuiu tata kelola
- Kelemahan
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tim Kolaborasi masih belum memiliki data dukung dokumentasi yang menunjukkan adanya MoU/PKS dengan instansi eksternal dan adanya program kerja kolaborasi SPBE yang disampaikan

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna , Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen

Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE

- Kekuatan
Kekuatan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada pemerintah Kabupaten Natuna belum ditemukan
- Kelemahan
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Natuna pada Manajemen Keamanan, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan masih belum memiliki bukti dukung dokumentasi yang menunjukkan penerapan telah terlaksana yang disampaikan

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit SPBE yang sudah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Natuna , Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Pelaksanaan Audit SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Natuna sudah dilakukan dengan BSSN dengan cakupan seluruh, dibuktikan dengan laporan audit keamanan oleh BSSN
- Kelemahan
Kelemahan Aspek Pelaksanaan Audit SPBE pada Pemerintah Kabupaten Natuna masih belum ditemukan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Hampir semua indikator menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Natuna menggunakan aplikasi layanan berbagi pakai dengan dibuktikan dokumentasi penggunaan SIPD, MyAsPK, Srikandi, ESR
- Kelemahan
Kelemahan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Natuna masih belum ditemukan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna , Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Semua Indikator menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Natuna telah menggunakan aplikasi layanan berbagi pakai dengan dibuktikan dokumentasi penggunaan Lapori, Simpad, PPID, efaedah, sicantik, DISDUKPID
- Kelemahan
Kelemahan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Natuna masih belum ditemukan

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna, sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik dan Aspek Layanan Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat pada Kebijakan Tata kelola melalui Peraturan Bupati 60/2022 yang telah mengamankan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Preangkat Daerah dengan K/L/Pemda lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan dan jasa melalui SIPD, dan kearsipan melalui Srikandi sehingga secara administratif terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Kelemahan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Natuna masih belum ditemukan, akan tetapi beberapa indikator masih bisa ditingkatkan tingkat kematangannya dengan proses reviu dan evaluasi dan ada tindak lanjutnya.

Sebagai masukan atau saran agar bisa meningkatkan penilaian evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna. Pada Aspek Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE masih ada berpeluang ditingkatkan tingkat kematangannya dengan melakukan menambah kegiatan reviu dan evaluasi serta memberikan tindak lanjut terhadap Kebijakan Internal sebelumnya. Pada Aspek Rencana Strategis SPBE perlu direviu tentang peta besar Inovasi Proses Bisnis dan dapat dikembangkan dokumentasinya sesuai dengan standar yang diberikan oleh KemenpanRB sehingga bisa memberikan gambaran Perubahan Proses Bisnis yang diunggulkan dalam Pemerintah Kabupaten Natuna, serta mereviu dan mengembangkan dokumen Pembangunan Aplikasi SPBE yang memehui siklus Pembangunan Aplikasi. Pada Aspek Penyelenggara SPBE perlu ada kegiatan kolaborasi yang berhubungan dengan SPBE agar dapat memenuhi indikator dan kriteria sesuai target. Aspek Penerapan Manajemen SPBE, diharapkan memiliki perencanaan kerja dan dokumen yang konkrit terutama menunjang Manajemen Keamanan, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen Perubahan dan Layanan. Aspek Audit TIK diharapkan tetap digendakan dan ditingkatkan dengan menggunakan standar auditor internal sesuai dengan aturan dari BRIN dan auditor eksternal dari BSSN sehingga mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan atau penggunaan TIK di Pemerintah Kabupaten Natuna

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024